

## Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

### A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan secara nasional. Capaian kinerja makro dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Makro} = \frac{\text{Capaian Kinerja Tahun 2025} - \text{Capaian Kinerja Tahun 2024}}{\text{Capaian Kinerja Tahun 2024}} \times 100\%$$

Capaian kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia	76,43	77,27
2.	Angka Kemiskinan	5,42	5,31
3.	Angka Pengangguran (%)	5,75	5,62
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,37	3,37
5.	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	57.083,09	59.548,83
6.	Ketimpangan Pendapatan (September)	0,283	0,282

*Sumber data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025*

### B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

#### 1. Urusan Pendidikan

##### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase Anak Usia 16 sampai dengan 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	84,49%	90,32%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
2	Persentase Anak Usia 4 sampai dengan 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	81,93%	90,21%
3	Persentase Toilet SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB dalam kondisi baik	-	55,35%
4	Persentase Ruang Kelas SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB dalam kondisi baik	-	52,73%

b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp.2.407.700.470.187,00 (92,52%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan:
  - a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
  - b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  - c) Pengelolaan Pendidikan Khusus.
- 2) Program Pengembangan Kurikulum, dengan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
- 4) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, dengan kegiatan Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Waktu pelaksanaan pekerjaan pada anggaran perubahan tidak mencukupi.
- 2) Efisiensi Kegiatan.
- 3) Terjadinya Bencana Alam.

## 2. Urusan Kesehatan

### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	100%	100%
2	Rasio Daya Tampung RS Rujukan (standar 1: 1000)	1:708	1:757
3	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	100%	100%
4	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	100%	100%

### b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar **Rp. 216.680.112.247 (95,92%)** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
  - a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  - b) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
  - c) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi; dan
  - d) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan:
  - a) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi; dan

- b) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya.
  - 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan dengan kegiatan:
    - a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
    - b) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
    - c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
  - c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
- c. Permasalahan Yang Dihadapi
- Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
- 1) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana
    - a) Akses Geografis dan Aksesibilitas  
Lokasi bencana yang terisolasi, putusnya jembatan, jalan tertutup tanah longsor, atau lokasi pengungsian yang sulit dijangkau tim medis
    - b) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan  
Terbatasnya jumlah tenaga medis yang siaga, kurangnya kompetensi dalam manajemen bencana, atau petugas kesehatan yang juga menjadi korban
    - c) Gangguan Komunikasi dan Listrik  
Terputusnya jaringan telekomunikasi dan listrik padam membuat koordinasi tim respon cepat terhambat dan pelaporan data krisis kesehatan menjadi lambat.
    - d) Masalah Logistik dan Distribusi  
Keterlambatan distribusi obat-obatan, alat kesehatan, dan sarana sanitasi ke lokasi pengungsian
    - e) Data Penduduk Terdampak Kurang Akurat/Lambat  
Sistem pelaporan penyakit yang belum reliable atau tidak terintegrasi menyebabkan data korban terdampak (terutama di lokasi terpencil) tidak tercatat cepat.
    - f) Kondisi Lingkungan dan Sanitasi  
Kurangnya air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian memicu penyakit sekunder (diare, ISPA, kulit), meningkatkan beban posko kesehatan secara drastis

- 2) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB
  - a) Ketepatan waktu dan kelengkapan laporan W1 dan PE belum optimal.
  - b) Sarana dan Infrastruktur yang tidak merata di beberapa daerah sehingga menyulitkan menjangkau area terdampak secara cepat
  - c) Belum maksimal koordinasi lintas sektor antara tingkat pusat, provinsi, hingga desa, serta kurangnya komitmen masyarakat.
  - d) Kapasitas SDM surveilans belum merata akibat mutasi/rotasi petugas.
  - e) Masih Rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan perilaku hidup bersih, serta faktor lingkungan yang mempercepat penyebaran penyakit
  - f) Penyelidikan epidemiologi dan investigasi kasus/kontak belum maksimal.
  - g) Data surveilans seb Pemanfaatan agai dasar peringatan dini dan keputusan masih terbatas.
  - h) Koordinasi lintas program dan lintas sektor belum berjalan optimal, termasuk ORI.
- 3) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit
  - a) Kekurangan SDM Kesehatan  
Kurangnya tenaga medis, spesialis, dan paramedis yang merata menyebabkan rumah sakit tidak mampu memaksimalkan kapasitas tempat tidur yang ada
  - b) Keterbatasan anggaran kesehatan
  - c) Perubahan Kebijakan (Implementasi KRIS)
  - d) Tantangan dalam penyesuaian kelas rawat inap standar (KRIS)
- 4) RS Rujukan Provinsi Terakreditasi  
Peningkatan mutu layanan kepada masyarakat agar status akreditasi paripurna benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	70,55%	71,10%

2.	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota	-	-
3.	Persentase Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPALD regional	-	-
4.	Persentase Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah Diterbitkan di Provinsi		-
5.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah		89,70 %

b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar **Rp. 326.785.163.129,00 (94,65%)** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota
- 2) Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, dengan kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
- 4) Program penataan bangunan gedung, dengan kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
- 5) Program penataan bangunan dan lingkungannya, dengan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Program penyelenggaraan jalan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- 7) Program penyelenggaraan penataan ruang, dengan kegiatan:

- a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi;
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang;
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; dan
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya SPAM Regional
- 2) Belum Adanya SPALD Regional
- 3) Kondisi cuaca ekstrem pasca bencana hidrometeorologi yang menyebabkan banyak jalan provinsi mengalami kerusakan (terban dan longsor)
- 4) Dibeberapa ruas jalan provinsi masih dilewati truk-truk berat dengan tonase melebihi batasan yang mengakibatkan terjadi kerusakan jalan karena kelebihan beban.
- 5) Tidak berimbangnnya alokasi anggaran yang diberikan dengan target kinerja yang harus dicapai

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Perumahan yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Provinsi Yang Memoeroleh Rumah Lavak Huni	100%	100%
2.	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yano Lavak Huni	100%	100%
3.	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 -15 Ha Yang Ditanganl	35,28%	25,58%

b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan

Realisasi belanja Urusan Perumahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar **Rp.117.259.736.074,00 (96,15%)** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :
  - a) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
  - b) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
  - c) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.
- 2) Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan :
  - a) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha; dan
  - b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Perumahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Banyaknya rumah yang berada pada kawasan rawan bencana banjir, longsor, gempa, bencana gunung merapi dan tsunami menyebabkan butuh alokasi anggaran besar dalam melakukan pendataan rumah yang disajikan *by name/by addres* sehingga pendataan dilakukan tidak dapat dituntaskan perkabupaten/kota yang hanya dapat dilakukan pada lingkup kecamatan. Pada tahun ini kegiatan pendataan berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan pada 2 kecamatan.
- 2) Sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat yang bermukim di kawasan terdampak bencana, Keterbatasan waktu dan anggaran sosialisasi dan perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap permukiman yang berada di kawasan rawan bencana.
- 3) Dalam Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :
  - a) Peran provinsi lebih bersifat fasilitasi dan koordinasi.
  - b) Keterbatasan sumber daya dalam mengawal pelaksanaan di kabupaten/kota.
  - c) Penyelenggaraan perumahan melibatkan banyak sektor (tata ruang, pertanahan, infrastruktur, sosial).
  - d) Data RTLH, backlog perumahan, dan kawasan kumuh belum seragam.

- 4) Program dan kegiatan perumahan antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat belum sepenuhnya selaras.
- 5) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah perbedaan metode pendataan kawasan kumuh antar daerah dan rendah penanganan terhadap kawasan kumuh di kabupaten/kota akibat keterbatasan anggaran.

5. Urusan Trantibum Linmas

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Trantibum Linmas yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100	100
2.	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	100
3.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	100	100
4	Persentase penanganan pra bencana	100	100
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100
6	Persentase penanganan pasca bencana	100	100

b. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas

Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar **Rp. 29.137.567.935,00 (91,62%)** yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah, yakni Satuan Polisi Pamong Praja dengan realisasi sebesar **Rp. 15.893.175.237,00 (97,94%)** dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi sebesar

**Rp.13.244.392.698,00 (85,04%)** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan:
  - a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
  - b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
  - c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
  - d) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- 2) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
  - a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - b) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
  - c) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Trantibum Linmas di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Belum seluruh kabupaten/kota yang membentuk Pusdalops PB sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pendataan dan masih kurangnya Kapasitas personil Pusdalops PB
- 2) Akurasi data sangat kurang di awal masa tanggap darurat. Hal ini disebabkan karena perubahan di lapangan yang sangat dinamis. Koordinasi dan integrasi data sangat sulit atau memerlukan waktu karena pelaku pendataan yang banyak sehingga data tidak terstandar. Disisi lain ego serktoral membuat integrasi data semakin sulit dilaksanakan dan lemahnya koordinasi antar unit/institusi Pemerintahan, dan juga koordinasi dengan/antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi Kemasyarakatan, media massa dan masyarakat
- 3) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-Pasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (R3P) sehingga usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi terlambat.
- 4) Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.
- 5) Belum memadainya dukungan anggaran dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

6. Urusan Sosial

a) Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Sosial yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	100 %	100 %
2.	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhannya di dalam Panti	100 %	100 %
3.	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100 %	100 %
4.	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	100 %	100 %
5.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provins	100 %	100 %
6.	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	NA	21,97 %

b) Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar **Rp. 80.742.937.849,00 (88,15%)** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan:
  - a) Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; dan
  - b) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial provinsi
- 2) Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan:
  - a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
  - b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
  - c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti; dan
  - d) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti.
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan:

- a) Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal;
  - b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
  - c) Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.
  - d) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.
  - e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- c) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah SDM yang belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan OPD. Seperti jumlah pekerja sosial yang ada tidak sebanding dengan jumlah kelayan yang dilayani. Satu orang pekerja sosial idealnya melayani 10 orang kelayan, tapi kenyataannya satu pekerja sosial melayani 50 orang kelayan.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan pada UPTD-UPTD, contohnya UPTD Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung, dimana alat-alat keterampilan otomotif yang dipakai untuk praktek tidak sesuai dengan kemajuan zaman, juga toolkit yang diterima kelayan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Contoh lainnya pada UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar untuk sarana dan prasarana pelayanan bagi lansia terlantar kondisinya sudah lama.
- 3) Bangunan atau gedung wisma pada UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin yang melaksanakan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar dalam kondisi tidak layak dan sebagian besar tergolong rusak sedang dan berat. Dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera bangunan wisma tersebut direnovasi atau diperbaiki.
- 4) Kurangnya minat dan kemauan dari anak-anak remaja putri terlantar untuk mengikuti bimbingan sosial dan keterampilan pada UPTD Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang, sehingga pengembangan usahanya pasca pembinaan di UPTD belum berjalan dengan baik.
- 5) PPKS SPM penerima manfaat program hibah untuk panti-panti milik masyarakat wajib masuk DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Berdasarkan pemadanan data tersebut, masih banyak ditemukan PPKS yang belum terdaftar DTSEN sehingga anggaran bantuan hibah tersebut tidak dapat direalisasikan 100 % pada tahun 2025 atau memiliki SILPA sebanyak Rp. 4.785.481.689,-
- 6) Terjadinya bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada akhir bulan November 2025 kemaren pada 16 kabupaten/kota di Wilayah

Provinsi Sumatera Barat, sehingga jumlah mutu yang harus dilayani untuk jenis SPM perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi meningkat secara signifikan.

### C. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

#### 1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa EPPD adalah mekanisme resmi pemerintah pusat untuk mengukur dan menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib (pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar) maupun urusan pilihan yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam bentuk LPPD.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menentukan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Evaluasi dilakukan oleh Tim Nasional (untuk tingkat Provinsi) dan Tim Daerah (Provinsi melakukan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota di wilayahnya) yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah. dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi (E-LPPD atau SILPPD). Hal ini bertujuan agar penilaian lebih objektif, transparan, dan akuntabel yang nantinya akan menghasilkan Skor Kinerja (Angka capaian) dan Status Kinerja/Kategori prestasi (misal: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, atau Rendah).

Hasil EPPD digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada daerah, serta menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian insentif fiskal (penghargaan) bagi daerah dengan kinerja terbaik.

Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih dalam posisi menanti rilis resmi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 terhadap LPPD Tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri. Proses ini merupakan tahapan krusial untuk memvalidasi apakah capaian kinerja makro dan sektoral yang telah dilaporkan melalui sistem SILPPD telah sesuai dengan standar nasional.

Meskipun hasil akhir belum keluar, Pemerintah Provinsi tetap konsisten melakukan penguatan internal terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa target kinerja daerah tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Penetapan hasil EPPD yang nantinya akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri memiliki nilai strategis bagi Sumatera Barat, antara lain:

- a. Sebagai wujud pemenuhan kewajiban kepala daerah dalam prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*).
  - b. Menjadi dasar evaluasi objektif bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
  - c. Hasil evaluasi yang positif menjadi prasyarat penting dalam pengajuan Dana Insentif guna mendukung percepatan pembangunan di wilayah Sumatera Barat.
2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya.  
Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Nomor 40.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 40.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 Provinsi berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024, yang berarti telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Unaudited) Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mencapai sebesar **Rp.6.204.600.686.549,16** dan Realisasi Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2025 mencapai **Rp.6.041.074.808.956,49** Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

#### REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	ANGGARAN	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	6.268.563.983.516,00	6.204.600.686.549,16	98,97
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.807.443.163.516,00	2.760.472.869.923,16	98,32
4.1.01	Pajak Daerah	2.118.471.018.085,00	2.056.281.596.209,75	97,06
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	600.341.827.516,00	574.547.936.950,00	95,7
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	260.000.000.000,00	297.951.805.000,00	114,59
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	745.000.000.000,00	705.559.525.853,00	94,7
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	14.448.745.350,00	12.008.128.811,00	83,1
4.1.01.05	Pajak Rokok	481.021.225.529,00	455.543.870.617,00	94,7
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	2.000.000.000,00	0	0
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	15.659.219.690,00	10.670.328.978,75	68,14
4.1.02	Retribusi Daerah	386.624.597.307,00	440.086.409.242,62	113,82
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	378.700.061.149,00	430.883.546.185,86	113,77

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	ANGGARAN	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.530.609.758,00	8.750.268.656,76	116,19
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	393.926.400,00	452.594.400,00	114,89
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139.682.145.880,00	126.838.893.909,00	90,8
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	139.682.145.880,00	126.838.893.909,00	90,8
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	162.665.402.244,00	137.265.970.561,79	84,38
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	9.500.000.000,00	204.895.200,00	2,15
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	18.245.334.000,00	10.975.900.000,00	60,15
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	3.364.801.000,00	3.611.494.660,00	107,33
4.1.04.05	Jasa Giro	6.250.000.000,00	7.857.208.122,56	125,71
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	12.300.000.000,00	12.238.894.076,00	99,5
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	58.000.000.000,00	55.898.450.567,93	96,37
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.277.500.000,00	3.039.134.063,00	71,04
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	50.727.767.244,00	43.439.993.872,30	85,63
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.807.443.163.516,00	2.760.472.869.923,16	98,32
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.418.953.623.000,00	3.405.275.915.726,00	99,59
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.380.007.413.000,00	3.365.500.418.626,00	99,57
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0	0	0
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	174.378.188.000,00	174.378.188.000,00	100
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.139.807.849.000,00	2.139.604.036.666,00	99,99
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.050.226.982.000,00	1.035.923.799.960,00	98,63
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	3.364.413.019.000,00	3.349.906.024.626,00	99,56
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.594.394.000,00	15.594.394.000,00	100
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	15.594.394.000,00	15.594.394.000,00	100
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.946.210.000,00	39.775.497.100,00	102,12
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	38.946.210.000,00	39.775.497.100,00	102,12
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	38.946.210.000,00	39.775.497.100,00	102,12
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	3.418.953.623.000,00	3.405.275.915.726,00	99,59
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.167.197.000,00	38.851.900.900,00	92,13
4.3.01	Pendapatan Hibah	22.167.197.000,00	18.851.900.900,00	85,04
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0	4.613.000,00	0

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	ANGGARAN	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	4.291.997.000,00	4.804.295.900,00	111,93
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17.875.200.000,00	14.042.992.000,00	78,56
4.3.02	Dana Darurat	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100
4.3.02.01	Dana Darurat	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.167.197.000,00	38.851.900.900,00	92,13
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.268.563.983.516,00</b>	<b>6.204.600.686.549,16</b>	<b>98,97</b>

### REALISASI BELANJA DAERAH

Kode Rekening	Jenis Belanja	ANGGARAN	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
5	BELANJA DAERAH	6.386.298.937.511,43	6.041.074.808.956,49	94,59
5.1	BELANJA OPERASI	4.677.715.033.301,66	4.392.105.685.829,36	93,89
5.1.01	Belanja Pegawai	2.774.495.521.943,00	2.597.123.147.452,00	93,6
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.509.050.327.691,00	1.477.853.716.524,00	97,93
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.218.164.350.232,00	1.072.417.545.603,00	88,03
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	62.056.184,00	0
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	41.091.992.400,00	41.037.673.927,00	99,86
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.692.199.375,00	1.255.502.969,00	74,19
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.496.652.245,00	4.496.652.245,00	100
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.740.825.071.754,66	1.641.177.957.051,36	94,27
5.1.02.01	Belanja Barang	280.106.743.105,43	250.203.695.270,00	89,32
5.1.02.02	Belanja Jasa	555.330.837.328,43	524.072.020.873,28	94,37
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	81.321.342.538,80	70.678.533.167,53	86,91
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	126.519.771.696,00	113.174.311.666,00	89,45
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.355.403.000,00	20.568.632.215,00	92
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	0	0
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	257.995.024.846,00	257.009.877.558,00	99,61
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	417.195.949.240,00	405.470.886.301,55	97,18
5.1.04	Belanja Subsidi	1.125.000.000,00	1.124.442.040,00	99,95
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.125.000.000,00	1.124.442.040,00	99,95
5.1.05	Belanja Hibah	161.269.439.604,00	152.680.139.286,00	94,67
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00	0	0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	80.075.550.404,00	74.506.481.703,00	93,04
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	76.883.010.000,00	74.862.778.383,00	97,37

5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.310.879.200,00	3.310.879.200,00	100
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0	0	0
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.677.715.033.301,66	4.392.105.685.829,36	93,89
5.2	BELANJA MODAL	777.207.295.841,28	719.602.262.636,13	92,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.782.202.021,00	10.756.157.250,00	72,76
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	14.782.202.021,00	10.756.157.250,00	72,76
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.302.203.702,00	193.855.260.182,00	92,61
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.042.158.560,00	1.739.594.805,00	85,18
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	18.134.455.754,00	15.050.690.380,00	82,99
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	30.043.250,00	29.835.250,00	99,3
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	16.555.050,00	13.520.000,00	81,66
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.425.698.972,00	24.018.929.332,00	90,89
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.674.144.916,00	2.025.780.151,00	75,75
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.167.332.574,00	7.944.161.581,00	97,26
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	55.758.894.964,00	53.419.010.300,00	95,8
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23.463.992.131,00	20.628.539.603,00	87,91
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	12.056.444.600,00	12.047.478.250,00	99,92
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	40.000.000,00	32.500.000,00	81,25
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	0	0
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	35.713.656.375,00	35.617.927.607,00	99,73
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	24.778.826.556,00	21.287.292.923,00	85,9
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.131.470.396,47	117.106.166.907,13	86,02
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	121.560.230.063,47	103.829.522.484,00	85,41
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	14.571.240.333,00	13.276.644.423,13	91,11
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	354.825.037.644,81	337.550.339.068,00	95,13
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	280.025.216.817,90	267.028.431.293,00	95,35
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	73.057.166.026,91	68.862.162.452,00	94,25
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.742.654.800,00	1.659.745.323,00	95,24
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0	0	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.166.382.077,00	60.334.339.229,00	97,05
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	7.100.550.500,00	5.252.358.200,00	73,97
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	50.494.798,00	48.481.000,00	96,01
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	80.000.000,00	80.000.000,00	100

5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0	0	0
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	54.935.336.779,00	54.953.500.029,00	100,03
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	0	0	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	777.207.295.841,28	719.602.262.636,13	92,58
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.000.997.000,00	7.122.821.563,00	79,13
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.000.997.000,00	7.122.821.563,00	79,13
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.000.997.000,00	7.122.821.563,00	79,13
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	9.000.997.000,00	7.122.821.563,00	79,13
5.4	BELANJA TRANSFER	922.375.611.368,49	922.244.038.928,00	99,98
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	866.806.142.668,49	866.806.142.668,00	99,99
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	866.806.142.668,49	866.806.142.668,00	99,99
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	55.569.468.700,00	55.437.896.260,00	99,76
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	55.569.468.700,00	55.437.896.260,00	99,76
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	922.375.611.368,49	922.244.038.928,00	99,98
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.386.298.937.511,43</b>	<b>6.041.074.808.956,49</b>	<b>94,59</b>

#### E. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Badan Kepegawaian Daerah	SIPANKAS 360 Derajat (Sistem Informasi Penilaian Kinerja PNS Berbasis Smartphone 360 derajat)	
2	Badan Kepegawaian Daerah	AKU PromoSI (Alat Komunikasi Usul Promosi MutaSI)	
3	Badan Kepegawaian Daerah	APLIKASI TALENT POOL	
4	Badan Kepegawaian Daerah	E-MADANI	
5	Badan Kepegawaian Daerah	INTEGRASI SISTEM INFORMASI ASN (INSAN)	
6	Badan Kepegawaian Daerah	LASKAR (Layanan Peminjaman Saprasi dan Permintaan ATK Terpadu)	
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peka Berbangsa (Penanaman Pendidikan Kesadaran Berbangs Dan Karakter Bangsa)	
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Si Papa Uni (Sistim Pengenalan Pancasila Pada Anak Usia Dini)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KESBANGPOL (SIJEMPOL)	
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DAERAH (SIPPOLDA)	
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SISTEM PENATAAN KEUANGAN KESBANGPOL (SITANGAN BAKESBANGPOL)	
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat "KLOPBANA"	
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pegawai Dalam Genggaman Antisipasi Mandiri untuk Bencana dan Organisasi "PEGANGAN AMBO"	
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PERI DIFA (PERINGATA DINI DIFABEL)	
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana Terpadu "TNGKAI PADU" Provinsi Sumatera Barat	
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<i>Dashboard</i> Bencana	
17	Badan Pendapatan Daerah	Bayar Pajak Japuik Sajo (BPJS)	
18	Badan Pendapatan Daerah	e-Pendapatan	
19	Badan Pendapatan Daerah	Gerakan Tabungan Pajak (GeBu Pajak)	
20	Badan Pendapatan Daerah	HUNTING TDU (Memburu Kendaraan Mati Pajak)	
21	Badan Pendapatan Daerah	KOLEGA (Kolaborasi dan Jemput Bola Taat Pajak)	
22	Badan Pendapatan Daerah	KUPETIK SIMANJA	
23	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Bajapuik TabaoK Samsat Payakumbuh	
24	Badan Pendapatan Daerah	Piaman Bajapuik	
25	Badan Pendapatan Daerah	SAHABAT SAMSAT	
26	Badan Pendapatan Daerah	SAMSAT JUM'AT BERKAH (SAJUBAH)	
27	Badan Pendapatan Daerah	SAMSAT BALAI (SAMBA)	
28	Badan Pendapatan Daerah	Samsat Malam Minggu	
29	Badan Pendapatan Daerah	SAMSAT MASUK SEKOLAH DI SMA / SMP SOLOK SELATAN	
30	Badan Pendapatan Daerah	Samsat Minggu Pagi	
31	Badan Pendapatan Daerah	SAMSAT SAJANGKA	
32	Badan Pendapatan Daerah	SAMSAT SKENA	
33	Badan Pendapatan Daerah	SAMSAT untuk "MAS KAWIN"	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
34	Badan Pendapatan Daerah	SAMSAT WISATA	
35	Badan Pendapatan Daerah	SARUNG (SAMSAT WARUNG)	
36	Badan Pendapatan Daerah	SI AKUR (Sistem Informasi Arsip Kuasi Rapi)	
37	Badan Pendapatan Daerah	SI RAJO (Sia Rajin kami Japuik PajaknyO)	
38	Badan Pendapatan Daerah	SIBIJAK	
39	Badan Pendapatan Daerah	Sidatuk Versi 2.1.0	
40	Badan Pendapatan Daerah	SISTEM INFORMASI REALISASI ANGGARAN BELANJA (SIRAP) BAPENDA	
41	Badan Pendapatan Daerah	Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang (PKB-BDU)	
42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PETI KESRA	
43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IKD Menu Sadata	
44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Gaji Kita	
45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SMART (Sistem Monitoring Administrasi)	
46	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MisBela (Kamis Belajar)	
47	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BESTIE (Belajar English Setiap Tuesday)	
48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Coaching Klinik	
49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Learning Mangemen System (LMS) Sumbar Cadiak	
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Aplikasi Asrama (SIRAMA)	
51	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN Online (SimpangKinol)	
52	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TAQLIMAT (Tahsin Al-Qur'an secara online Setiap Jum'at)	
53	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Candu ASN FIT (Coaching Terpadu ASN Fungsional Inisiatif Terarah)	
54	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SIMAS (Sistem Informasi Manajemen Surat)	
55	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	KMS (Knowledge Management System)	
56	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ASN Sumbar Corpu	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
57	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Portal ASN Sumbar Corpu	
58	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SIKAT (Sistem Informasi Kepegawaian Terpadu)	
59	Badan Penghubung	sosialisasi perundang undangan	
60	Badan Penghubung	Web e-anjungan.sumbarprov.go.id	
61	Badan Penghubung	Web e-rantau.sumbarprov.go.id	
62	Badan Perencana Pembangunan Daerah	SAKATO PLAN Versi 2	
63	Badan Perencana Pembangunan Daerah	Dasboard Pembangunan Versi 2	
64	Badan Perencana Pembangunan Daerah	PERMISI (Perkuatan Perencanaan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi)	
65	Badan Perencana Pembangunan Daerah	ASIKIN-BAPPEDA (Aplikasi Sistem Kinerja Individu Bappeda)	
66	Badan Perencana Pembangunan Daerah	SIGAMAD (Sistem Informasi Nagari Madani)	
67	Badan Perencana Pembangunan Daerah	SIMPATI (Sistem Magang Perencana Terintegrasi)	
68	Badan Perencana Pembangunan Daerah	SENSASI (Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Penerapan Pendekatan Graduasi di Provinsi Sumatera Barat)	
69	Biro Administrasi Pimpinan	SP Reward dan Punishment	
70	Biro Administrasi Pimpinan	Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (SIPPAK)	
71	Biro Administrasi Pimpinan	Sistem Informasi Realisasi Anggaran Biro Administrasi Pimpinan (SIRA Biro Adpim)	
72	Biro Administrasi Pimpinan	Sistem Konfirmasi Kehadiran Tamu Secara Realtime pada Upacara Hari Besar Nasional	
73	Biro Administrasi Pimpinan	Humas Merdeka	
74	Biro Hukum	SIPEKA (Sistem Informasi Penomoran SK)	
75	Biro Hukum	SI-PROKUM (Sistem Informasi Progres Produk Hukum)	
76	Biro Hukum	KLIK HUKUM (Komunikasi Langsung Informasi Konsultasi Hukum)	
77	Biro Kesejahteraan Rakyat	Desk Pelayanan Administrasi Hibah PAUD (DP Abah PAUD)	
78	Biro Kesejahteraan Rakyat	Klik GEMA	
79	Biro Kesejahteraan Rakyat	SIRAHMAH 2024	
80	Biro Organisasi	Sepakat (Survey Kepuasan Masyarakat)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
81	Biro Organisasi	SiMantap (Sistem Informasi Manajemen Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi)	
82	Biro Organisasi	TUNTAS KINERJA (Tuntunan dan Asistensi Laporan Kinerja) SUMBAR	
83	Biro Administrasi Pembangunan	SiDaperi (Sistem Informasi Pelaporan Dana Perimbangan)	
84	Biro Administrasi Pembangunan	SIMBANGDA BASED EVIDENCE VERSI 5.1	
85	Biro Administrasi Pembangunan	PUSTARA (Pusat Data Rapat dan Administrasi)	
86	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	kerjasama Sumatera Barat (KERABAT)	
87	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	SARASA (Sarapan Bersama ASN)	
88	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	SISTEM INFORMASI TATA PEMERINTAHAN (SI-TAMPAN)	
89	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	JEMBOL (Jemput Bola)	
90	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Lamari PBJ (Layanan Manajemen Arsip PBJ)	
91	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	P3BJ (Penilaian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa)	
92	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	SATALI (Sistem Administrasi Pengalaman Penyedia) Versi 2.0	
93	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	SIPEDAL (Sistem Informasi Pengendalian PBJ) Versi 3.0	
94	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	BARAJA PBJ (Bincang Aktif Regulasi dan Aplikatif Jo Ahli PBJ)	
95	Biro Perekonomian	BUNDA BLUD (Basis Untuk Data Badan Layanan Umum Daerah)	
96	Biro Perekonomian	Sinergi Ekonomi Lokal Tumbuh (SELAT)	
97	Biro Perekonomian	Waspuksidi (Pengawasan Pupuk Bersubsidi)	
98	Biro Umum	Simonevkin 2.0 (Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)	
99	Biro Umum	Sistem Layanan Biro Umum	
100	Biro Umum	SIDARA (Sistem Informasi Pemeliharaan Aset Daerah)	
101	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dashboard layanan publik DBMCKTR	
102	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	e-PTBGN (Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
103	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	SIJANTAN (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan)	
104	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dasbor Geospasial One Map	
105	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	ABeGe (Asesmen Bangunan Gedung Negara)	
106	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Pusat Mutu Konstruksi (CQC)	
107	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Pelaporan Kerusakan Jalan	
108	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Optimalisasi Kinerja Pemeliharaan Jalan Melalui Preventif Maintenance	
109	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	LAPTARU (Layanan Pengaduan Tata Ruang) Berbasis Sistem Crowdsourcing dan Teknologi Geospasial	
110	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang) untuk Mendorong Pengembangan Wilayah dan Pemerataan Ekonomi	
111	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Sistem Informasi Edukasi Quality (Si ETy)	
112	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Sistem Informasi Manajemen Alat Berat Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (SIMLAT_BMCKTR)	
113	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Sistem Informasi Pengamat Jalan (SiPenJal)	
114	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Pengembangan Aplikasi SIJANTAN NextGen	
115	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Sistem Informasi Usulan Masyarakat (SISULMAS)	
116	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	SITJALOB	
117	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Call Center Air Tanah Sumatera Barat (CETAR SUMBAR)	
118	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	E-boc (ESDM Box Centre)	
119	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Informasi Tambang Terkini (INFO BANG)	
120	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	LAYANAN ASISTENSI DAN KONSULTASI IZIN AIR TANAH (LASUAH)	
121	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PLTS IRIGASI UNTUK PERTANIAN	
122	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sistem Informasi Digital Tambang Sumatera Barat (SI ABANG SABAR)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
123	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Formulir Sasaran Kinerja Pegawai (FSKP) Fungsional Teknis	
124	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Layanan Tanya Arsip Pustaka (Layanan Tanya APA)	
125	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Wakaf Hibah Buku (WAHIBU)	
126	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Layanan Kearsipan dan SRIKANDI (Laskar Srikandi)	
127	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sistem Penyelamatan dan Perlindungan ArsipAset (SILADU SIPSET)	
128	Dinas Kebudayaan	Arsip Online Disbud (ASOI)	
129	Dinas Kebudayaan	Digitalisasi Kegiatan Tahunan Dinas Kebudayaan	
130	Dinas Kebudayaan	Inovasi UPTD Taman Budaya	
131	Dinas Kebudayaan	Peta Sebaran Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat (SEGARDAYA)	
132	Dinas Kebudayaan.	Pustaka Digital Kebudayaan (PUGIAN)	
133	Dinas Kebudayaan.	Pustaka Digital Museum	
134	Dinas Kebudayaan.	Sistem Database Dokumentasi Kebudayaan Sumbar (SIDADOK)	
135	Dinas Kebudayaan.	TABRANI SUMBAR	
136	Dinas Kehutanan	BATU PS (Batas Alam Perhutanan Sosial dengan Tanaman Unggulan)	
137	Dinas Kehutanan	E-CUTI	
138	Dinas Kehutanan	Eduwisata Lebah Seluruh KTH Taram Batuah	
139	Dinas Kehutanan	LAPOR MADU	
140	Dinas Kehutanan	MP-PPS (Market Place Produk Perhutanan. Sosial)	
141	Dinas Kehutanan	PAMHUT BTS (PENGAMANAN HUTAN BERBASIS TRACKING SMARTPHONE)	
142	Dinas Kehutanan	PELOPSA (Peta Lokasi Perhutanan Sosial dengan Avenza)	
143	Dinas Kehutanan	Respon Cepat Dalkarhutla	
144	Dinas Kehutanan	SI Intan BerOTan (Sistem Informasi Inventarisasi Hutan Berkala pada Blok Pemanfaatan)	
145	Dinas Kehutanan	SI KEMPAS (KOLABORASI KERJASAMA PEMANFAATAN KAYU DENGAN PERHUTANAN SOSIAL)	
146	Dinas Kehutanan	SICEPOT (Sistem Pengecekan Dini Titik Hotspot)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
147	Dinas Kehutanan	SIKAP (Sistem Informasi Klarifikasi Kawasan Hutan dan PIPPIB)	
148	Dinas Kehutanan	SIKAWAN SUMBAR (Sistem Informasi Kawasan Hutan Sumatera Barat) v.23	
149	Dinas Kehutanan	SIPOTARA (Sistem Informasi Potensi KPHL Agam Raya)	
150	Dinas Kehutanan	SIPS Sumbar (Sistem Informasi Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat)	
151	Dinas Kehutanan	Sistem dan Metode Penyuluhan Kehutanan (Simpay Hutan)	
152	Dinas Kehutanan	Sistem Informasi Layanan Kehutanan (SILK)	
153	Dinas Kehutanan	SUTAN TANIHUT (Survei Petani Hutan Provinsi Sumatera Barat)	
154	Dinas Kehutanan	MONITORING ONLINE PPHHBK (PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU)	
155	Dinas Kehutanan	GEMA (Gemar Minum Madu)	
156	Dinas Kehutanan	RUBAH (Ruang Belajar Petani Hutan)	
157	Dinas Kehutanan	Sistem Informasi Geotagging Aksi Penanaman (SIGAP)	
158	Dinas Kelautan Perikanan	Sistem Budidaya Lobster di Keramba Long Line Aquatek (Sibudi Ke Lotek)	
159	Dinas Kelautan Perikanan	Buku Saku Hama dan Penyakit Ikan (BUSAHATI)	
160	Dinas Kelautan Perikanan	GEPREKAN (Gerai Perizinan Kapal Perikanan)	
161	Dinas Kelautan Perikanan	MICELAMAS (Mitigasi Dengan Cemara Laut Berbasis Masyarakat)	
162	Dinas Kelautan Perikanan	SI-MANTIAK (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	
163	Dinas Kelautan Perikanan	LAMANG MALIN (LABORATORIUM MALALA PENGUJIAN FORMALIN)	
164	Dinas Kelautan Perikanan	SISTEM INFORMASI LAYANAN UNTUK ADMINISTRASI KEBERANGKATAN KAPAL (SILAUAK)	
165	Dinas Kelautan Perikanan	SIDAKAPRO (Sistem Informasi Data Kapal dan Data Produksi)	
166	Dinas Kelautan Perikanan	SILAKSI	
167	Dinas Kelautan Perikanan	Sistem Informasi Pasar Ikan (SIPASAN)	
168	Dinas Kelautan Perikanan	Tabungan Kontrak Perumahan Nelayan Mentawai (TAKOPER)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
169	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SILALA KEMAT Versi 1.2 (Sistem Informasi layanan akta kelahiran dan kematian di fasilitas kesehatan Versi 1.2)	
170	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	ASIK (Aplikasi eSign Disdukcapil Kabupaten/kota se-Sumatera Barat)	
171	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	COD (Coaching Clinic Dukcapil)	
172	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	E-SIPIL (Elektronik Arsip Digital Disdukcapil Provinsi Sumbar)	
173	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	KONSULTAN DUKCAPIL (Layanan Konsultasi Penyelesaian Masalah Administrasi Kependudukan)	
174	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	MAKAN PENSI (Memberikan Layanan Dokumen Kependudukan bagi Pensiunan)	
175	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	PELITA KIA (Pemberian Fasilitas Kartu Identitas Anak bagi Organisasi Masyarakat)	
176	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	RINDUFTP (Sistem Informasi Data Kependudukan Melalui File Transfer Protocol Dukcapil Sumatera Barat)	
177	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SI EBIT GIRANG (Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing)	
178	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIDADU (Sistem Informasi Pendaftaran Penduduk)	
179	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIDALINMAS (Sistem Inovasi Pendaftaran online Masyarakat Sumbar)	
180	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIDANDI-S2 (Sistem Informasi Data Kependudukan Ganda/Anomali Kabupaten Kota Se Sumbar)	
181	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIDAPENDA (Sistem Informasi Data Balikan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat)	
182	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIGADIS (Sistem Informasi Gabungan Inovasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)	
183	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIIDO-D3 (Sistem Informasi Dokumentasi Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)	
184	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIIRA (Sistem Informasi Permintaan Data OPD)	
185	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SILAYLI (Sistem Inovasi pelayanan online Dinas 185 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
186	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SUVI (Sistem Update Versi Aplikasi Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)	
187	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	TANDUK KEREN (Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan)	
188	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	TRC KONTAK NANA (Tim Reaksi Cepat Pemulihan Dokumen Kependudukan Korban Bencana)	
189	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIKAT (Sistem Informasi Sertifikat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)	
190	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SI-BASIS (Sistem Informasi Bahan Sertifikasi ISO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Provinsi Sumatera Barat)	
191	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	LAKONDUAPAS (Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pencatatan Sipil)	
192	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIBUKMA (Sistim Informasi Buku Pokok Pemakaman/Kematian)	
193	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIUDAWIN (Sistim Informasi Untuk Pendataan Perkawinan)	
194	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIUDARAI (Sistim Informasi Untuk Pendataan Perceraian]	
195	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	PERWITASATU (Penyelesaian Perkawinan Tidak Tercatat Secara Terpadu)	
196	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	BUKTICAPIL (Buku Putih Pencatatan Sipil)	
197	Dinas Kesehatan	AMAL JARIYAH (Ayo MARI Laksanakan penJARingan penYakit mata Anak di sekolaH)	
198	Dinas Kesehatan	BIDADARI SURGA (Benefit Data DikiAt daRI SelURuh tenaGA kesehatan untuk kinerja)	
199	Dinas Kesehatan	D'MODIS (Diskusi dan Monitoring Terpadu Imunisasi)	
200	Dinas Kesehatan	RASA SURGA (Raih ASA Sehat bUgar Jiwa Raga)	
201	Dinas Kesehatan	SOSIS VITUBE	
202	Dinas Kesehatan	REGHALL	
203	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	ABSENSI ONLINE (ABON)	
204	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	ATAU KODE	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
205	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Nagari Statistik	
206	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Inovasi Pelayanan Umum Terpadu (PADU)	
207	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	PPDB ONLINE SUMBAR	
208	Dinas Koperasi dan UKM	Arsip Digital Koperasi dan UKM Prov. Sumatera Barat	
209	Dinas Koperasi dan UKM	Cara Cepat Laporan RAT (CAPEKLAH RAT)	
210	Dinas Koperasi dan UKM	Yang satu	
211	Dinas Koperasi dan UKM	AKADEMI PLUZI	
212	Dinas Koperasi dan UKM	RAPATIN (RUANG RAPAT TERINTEGRASI)	
213	Dinas Koperasi dan UKM	Simak	
214	Dinas Koperasi dan UKM	Sipanka Kopsyah	
215	Dinas Koperasi dan UKM	Sistem Peminjaman Mobil Operasional Dinas (SIP MODIS)	
216	Dinas Koperasi dan UKM	Sistim Informasi Pelaksanaan Pelatihan (SIP LATIH)	
217	Dinas Koperasi dan UKM	Bentuk Tilakes	
218	Dinas Lingkungan Hidup	Lemari Arsip Digital PNS	
219	Dinas Lingkungan Hidup	Sekolah Asuh Adiwiyata	
220	Dinas Pangan	POKEMAN (POJOK KEAMANAN PANGAN)	
221	Dinas Pangan	BILBOX PANGAN 2.0 (MOBIL BOX PENGANTAR PANGAN)	
222	Dinas Pangan	DISAPA (Distribusi dan Akses Pangan)	
223	Dinas Pangan	INformasi CADangan PANGAN (INCAD PANGAN)	
224	Dinas Pangan	INFORMasi harga pangaN (INFORMAN)	
225	Dinas Pangan	PENGUSAHA LAPAK (Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal)	
226	Dinas Pangan	AKU MAPAN 2.0 (ANALISA KETERSEDIAAN UNTUK MANDIRI PANGAN)	
227	Dinas Pangan	REVIL PADI (REVItaLisasi penggilingan PADI kecil)	
228	Dinas Pangan	SESPRI WanTuTri	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
229	Dinas Pangan	SIPASAN BUAS (Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Buah, Sayur Segar, Beras dan Rempah)	
230	Dinas Pangan	NAWARUPARI (Nagari Kawasan Rumah Pangan Lestari)	
231	Dinas Pangan	SIHARGA (Sistem Informasi Harga Pangan)	
232	Dinas Pangan	GANTI LAPAK (Pengembangan Industri Pengolahan Pangan Lokal)	
233	Dinas Pangan	MEJENG SALAPAK (Membangun Jejaring Usaha Pengolahan Pangan Lokal)	
234	Dinas Pangan	RAM (Ruang Aspirasi Masyarakat)	
235	Dinas Pariwisata	EKSPRESI (eKatalog Ekonomi Kreatif)	
236	Dinas Pariwisata	Fasilitasi Pendaftaran hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
237	Dinas Pariwisata	KUPAS (Kurikulum Pariwisata)	
238	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Evaluasi Perkembangan Desa Melalui Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan	
239	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Simbolin Emas (Sistem Pendataan Berbasis ONLINE Lembaga Kemasyarakatan)	
240	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menjaga Desa (Masyarakat Edukatif Nagari Jaga dan Desa)	
241	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	E-BOOK Indeks Desa	
242	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pendampingan NAgari KERjasama dengan universiTAS (PENA KERTAS)	
243	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	Pengembangan Sekolah Ramah Anak (BASORAK)	
244	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	Percepatan Kota Layak Anak (Pakola)	
245	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	SAHABAT PPA	
246	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	SAPA CERIA (Sentra Aktivitas & Pustaka Anak Ceria)	
247	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	Sistem Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (Si Randa Puger)	
248	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	Cetting Kagama (Cegah Stunting Melalui Pemuka Agama)	
249	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	Diksipani Kesra (Pendidikan Persiapan Nikah untuk Keluarga Sejahtera)	
250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	Dig Grande PK (Digitalisasi Grand Desian Pembangunan Kependudukan)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
251	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	Penguatan Aksi Nyata Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Sumbar Tangguh 2045 (PANTAU SUMBAR)	
252	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	MALAMANG (Maota Lamak Isu Perempuan dan Anak di Minang)	
253	Dinas Pemuda dan Olahraga	RESIPORA	
254	Dinas Pemuda dan Olahraga	SIDAKA (Sistem Database Pramuka)	
255	Dinas Pemuda dan Olahraga	ASIK KBOR SUMBAR (Analisis Fisik Kebakatan Olahraga Sumatera Barat)	
256	Dinas Pemuda dan Olahraga	HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor)	
257	Dinas Pemuda dan Olahraga	Sistem Informasi Pendataan Pelatihan dan Kejuaraan Olahraga (SIPPKO)	
258	Dinas Pemuda dan Olahraga	AYCM (Pertemuan Kreatif Pemuda ASEAN)	
259	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	INTENSIFIKASI PERIZINAN PRIORITAS BAGI UMK (INTIP UMK)	
260	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	LOKUS (Layanan OSS Kemitraan Usaha)	
261	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	MALIN BATUAH (MELAKSANAKAN KAJIAN FIQIH PAGI JUMAT BERKAH)	
262	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PELAYANAN MASYARAKAT PENYELENGGARAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (NAN MAKNYOSS)	
263	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	RANAH MAIMBAU	
264	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	SERBU LKPM (Sistem Verifikasi dan Buru LKPM)	
265	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	SIPOPEI	
266	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PROMISIS SUMBAR (Promosi Investasi Sumatera Barat)	
267	Dinas Pendidikan	Tausiyah Jum'at Pagi	
268	Dinas Pendidikan	Pesantren Ramadhan Unggulan	
269	Dinas Pendidikan	Portal Literasi (Porsi) untuk Meningkatkan Literasi	
270	Dinas Pendidikan	BRAJA (Batik Remaja Inovasi Siswa)	
271	Dinas Pendidikan	SIMTOR GTK (Simtem Monitoring Layanan GTK)	
272	Dinas Pendidikan	Sibatako (Sistem Basis data Sekolah)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
273	Dinas Pendidikan	Optimalisasi Pemanfaatan Website dan Media Sosial Dinas yang terintegrasi ke UPTD/Cabang Dinas dan Sekolah se-Sumatera Barat	
274	Dinas Pendidikan	TSAQIF FSI 4.0	
275	Dinas Pendidikan	Bank Sampah	
276	Dinas Pendidikan	Sistem Informasi BK Terpadu	
277	Dinas Pendidikan	SIKAMEK CABDIN 2	
278	Dinas Pendidikan	Saya belum membuka KPKSiun	
279	Dinas Pendidikan	Buku Tamu Elektronik	
280	Dinas Pendidikan	KGB Elektronik	
281	Dinas Pendidikan	Sistem Pelayanan Informasi Berbasis Web (SIPEBEWEB)	
282	Dinas Pendidikan	Literasi Digital Keterbukaan Informasi Publik SMAN 3 Painan	
283	Dinas Pendidikan	Bina Kerohanian Remaja (BKR)	
284	Dinas Perhubungan	e-RETRIBUSI TERMINAL	
285	Dinas Perhubungan	INKA PESTA (INTEGRASI KERETA API - PENUNJANG WISATA)	
286	Dinas Perhubungan	KAPEKEL TERMINAL	
287	Dinas Perhubungan	KLINIK TRANSPORTASI	
288	Dinas Perhubungan	SATU KLIK UNTUK SEMUA	
289	Dinas Perhubungan	SISTEM SATU ARAH (OWS)	
290	Dinas Perhubungan	PENGENDARA KECE (PENANGGULANGAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN)	
291	Dinas Perhubungan	RIKSARANMORGABPOLSIPAT (Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Gabungan Pola Sidang di Tempat)	
292	Dinas Perhubungan	SAPA Terminal (Sahabat Pelayanan dan Aspirasi Aduan Terminal)	
293	Dinas Perhubungan	Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum (SIMPAU)	
294	Dinas Perhubungan	Sistem Informasi Pelayaran (SIPEL)	
295	Dinas Perhubungan	Tama (Peta Bersama)	
296	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Halo Perdagangan (HaloDag)	
297	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepuasan Pelanggan Kalibrasi dan Pengujian Mutu (Kepelkamu)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
298	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PENGISIAN DATA REALISASI RENCANA AKSI (PETASIANA)	
299	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RUANG JAWAB KONSULTASI IZIN SEKTOR INDUSTRI (RUJAK ISTRI)	
300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SAMA (Serba Atsiri Market)	
301	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIANDUMEN (Sistim Pelayanan Pengaduan Konsumen)	
302	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SISTEM PELAYANAN INDUSTRI TERPADU (SiPIITer)	
303	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Alat Buat Guludan TR 4 (ABG TR 4)	
304	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	APH Anti Maling HP (Agens Pengendali Hayati Antisipasi Ramah Lingkungan dalam Pengendalian Hama Penyakit)	
305	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dashboard Registrasi Lahan Hortikultura (DERAS HORTI)	
306	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Data Online Pertanian (DATO Tani)	
307	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Form Kunjungan dan Magang UPTD BBI TPHP Sumbar	
308	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengolahan Daun Gambir dengan menggunakan Mesin Penghancur Sistim Ulir	
309	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PERBANYAKAN BENIH KENTANG DENGAN SISTEM AEROPONIK	
310	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pesnab Papain (Pestisida Nabati Papain)	
311	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Promosi Beraneka Olahan Tanaman Pangan (Si-BroTamPan)	
312	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	SI DATOK TAMPAN (Sistem Informasi Data Stok Benih Tanaman Pangan)	
313	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sistem Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
314	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sistem Penilaian Usaha Perkebunan (SiP-UP)	
315	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pojok KONTAN (Pojok Konsultasi Pertanahan)	
316	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	SEMPADAN (Sistem Informasi Pengadaan Tanah)	
317	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sistem Informasi Penyediaan Perumahan (SIPP)	
318	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	DASHBOARD PETERNAKAN	
319	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	NGORBIT (Ngobrol Bareng Wasbit)	
320	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SILSILA BARU BASIS (Persilangan Sapi Lokal Pembentukan Rumpun Baru Bali-Simental-Pesisir)	
321	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SITARANAK (Sistem Informasi Tata Rekording Ternak)	
322	Dinas Sosial	BUDIDAYA MANGGOT SOLUSI SAMPAH ORGANIK DALAM PANTI UPTD PSBR HARAPAN PADANG PANJANG	
323	Dinas Sosial	DHARUL (Dangau Harmonis Adaptif Rehabilitasi Usia Lanjut)	
324	Dinas Sosial	Dinamika M- Bissing (Disabilitas Netra Mandiri dan Berkarya Melalui Bis Massage Keliling)	
325	Dinas Sosial	Kapunduang Manis (Kembalinya Perempuan Menjadi Bunda Kandung, Masyarakat Harmonis) melalui Panti Multilayanan	
326	Dinas Sosial	PADUSI (PONDOK INFORMASI RUMAHKU DISINI)	
327	Dinas Sosial	Pramuka Sahabat Bencana (KAGANA)	
328	Dinas Sosial	SERASA (SEREH SEHAT LANSIA)	
329	Dinas Sosial	PASAN KAMI (Panti Sasana Sulaman Kreatif Minang)	
330	Dinas Sosial	PERAN KITA (Pendidikan Kesetaraan Bagi Kawan Disabilitas Netra)	
331	Dinas Sosial	Usaha Mikro Seni Kreatif Disabilitas Intelektual	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
332	Dinas Sosial	Peningkatan Kompetensi Anak Asuh melalui Kegiatan Mixed Farming	
333	Dinas Sosial	Lansia Berkarya Melalui kegiatan Karangn Bunga	
334	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	LIHAI BANA	
335	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Sistem Informasi Hidroklimatologi Online (SIHirO)	
336	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Sistem Informasi Kebencanaan Akibat Daya Rusak Air (SiKADRA)	
337	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Sistem Informasi Pengendalian Konstruksi Terpadu (SIGESIT)	
338	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	CINTA KESING (CIPTAKAN TENAGA KERJA SIAP SAING)	
339	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	DIGILAP IPK (Digital Laporan Informasi Pasar Kerja)	
340	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	KEWAJIBAN BADAN USAHA BIDANG KETENAGAKERJAAN (KEBUN_NAKER)	
341	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	P3BKK (PENDAPATAN, PERUBAHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PADA BURSA KERJA KHUSUS)	
342	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	PELESTARI (Permintaan Pelaksanaan Masyarakat dan industri)	
343	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	Pemilihan Calon Transmigran (LINCAH TRANS Versi 2)	
344	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	Pendataan dan Penilaian Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan Provinsi Sumatera Barat Online (HI- SUMBAR)	
345	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	PENJAWAL PESAN BLK PP (Penjaringan Awal Peserta Pelatihan Balai Latihan Kerja Padang Panjang	
346	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	Permintaan Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja (PERPU K3)	
347	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	SILAKON (SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN ONLINE)	
348	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	SILAPOR (Sistem Laporan Pelanggaran Ketenagakerjaan)	
349	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	SIMPEK (Sistem Pelaporan Pelaksanaan Pengawas Ketenagakerjaan)	
350	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	SIRATNA (Sistem Rencana Training Need analysis) UPTD Balai Latihan Kerja Payakumbuh	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
351	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	Sistem Buku Tamu Online (TEBU ONLINE)	
352	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	SISTEM INFORMASI PENGADUAN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN PADA UPTD WASNAKER 2 (SIYANDU_NAKER)	
353	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	sistem laporan kecelakaan kerja "LAKAJA"	
354	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	Sistem Pelayanan Pengesahan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) "SIPASAN P2K3"	
355	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	Sistem Peminjaman Terintegrasi (SIPINTER)	
356	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	Sistem Pendataan Warga Transmigrasi Versi 2 (TAWARAN V2)	
357	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	SUKPEL K3 Online (Survey Kepuasan Pelanggan Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Online)	
358	Inspektorat Provinsi	SI SUKA BETE (Sistem Informasi Surat Keterangan Bebas Temuan)	
359	Inspektorat Provinsi	SIMPATI (SISTEM INFORMASI PENGAWASAN TERINTEGRASI) REBORN	
360	Satuan Polisi Pamong Praja	DUTA TRANTIBUM	
361	Satuan Polisi Pamong Praja	KOPITALAS (Kelas Online Peningkatan Kapasitas Satlinmas)	
362	Satuan Polisi Pamong Praja	LAPOR PAK SUMBAR	
363	Satuan Polisi Pamong Praja	SI CAKEP SATPOL PP PROV SUMBAR (SISTEM INFORMASI RENCANA, PELAKSANAAN, EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT)	
364	Satuan Polisi Pamong Praja	SIMPOLPP SUMBAR (Sistem Informasi Pol PP Sumbar)	
365	Sekretaris DPRD	Agenda ASIK	
366	Sekretaris DPRD	Aplikasi Absensi Non ASN	
367	Sekretaris DPRD	Buntal (Buku Tamu Digital)	
368	Sekretaris DPRD	e-PPID	
369	Sekretaris DPRD	Podcast ASIK	
370	Sekretaris DPRD	Sisfo Kendaraan	
371	RSUD M. Natsir Solok	OPERLA JANIN SUMBARGASEL (Optimalisasi Peran Rumah Sakit)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Mohammad Natsir Sebagai Rujukan Layanan Jantung Intervensi di Regional III Sumatera Barat Bagian Selatan)	
372	RSUD M. Natsir Solok	SADAR DOSA (Sehatkan dan Asrikan Rumah Sakit dengan Olah Sampah)	
373	RSUD M. Natsir Solok	SaMose (Santiang Basamo SeleBelt/Selasa Belajar)	
374	RSUD M. Natsir Solok	DALANG TOLITIK (Daur Ulang Botol Infus Plastik)	
375	RSUD M. Natsir Solok	OPERA SI OJAN (Optimalisasi Pelayanan Radiologi Melalui Sistem Informasi Online 24 Jam)	
376	RSUD M. Natsir Solok	KONTES LATO-LATO (Koordinasi Tim Solid Pemberi Layanan Terhadap ODGJ sebagai Layanan Terintegrasi OK)	
377	RSUD M. Natsir Solok	REMIX (Reuse Jerigen Bekas Menjadi Safety Box)	
378	RSUD M. Natsir Solok	SI KONSI (Sesi Konsultasi ASI)	
379	RSUD M. Natsir Solok	AISITERU (Bayi Kecil Sehat dengan ASI dan Metode Kanguru)	
380	RSUD M. Natsir Solok	LEGO (Leaflet Elektronik Gudang Informasi)	
381	RSUD M. Natsir Solok	CAMAR (Cara Aman Memadamkan Api Menggunakan APAR)	
382	RSUD M. Natsir Solok	MOBIL SI NADA (Mobilisasi Dini dan Relaksasi Nafas Dalam)	
383	RSUD M. Natsir Solok	DEDIKASI RSMN (Dengan Skedit Gerakkan Informasi Mitra Kerjasama RSUD M. Natsir)	
384	RSUD M. Natsir Solok	SIAP LAPOR (Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Harian Operasional Rumah Sakit)	
385	RSUD M. Natsir Solok	LARUSAK (Laporan kerusakan Alat Elektromedik)	
386	RSUD M. Natsir Solok	RUJUKITA (Rujukan Kita Aman)	
387	RSUD M. Natsir Solok	BAGIAN JIWA DENAI (Berbagi Informasi Kesehatan Jiwa dengan Tontonan Edukasi)	
388	RSUD M. Natsir Solok	BUKU POLISI (Buku Saku Peduli Pola Hidup Penderita Hipertensi)	
389	RSUD M. Natsir Solok	SIAGA ASI (Solusi Ibu Ayah dan Keluarga dalam Memberikan ASI)	
390	RSUD M. Natsir Solok	Gerpu ICU (Gerakan Penyuluhan ICU)	
391	RSUD M. Natsir Solok	Kaba ICU (Keluarga Aktif dan Berada di Area ICU)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
392	RSUD M. Natsir Solok	Opera	
393	RSUD M. Natsir Solok	Sadar Dosa	
394	RSUD M. Natsir Solok	ShareLock Bangsamsir	
395	RSUD M. Natsir Solok	Rujuk Kita	
396	RSUD M. Natsir Solok	Keluar TOL	
397	RSUD M. Natsir Solok	PeDuli-IGD (Peningkatan peDULI masyarakat terhadap kriteria gawat darurat di IGD)	
398	RSUD M. Natsir Solok	SIKEREN (Sistem Informasi Kinerja Online)	
399	RSUD M. Natsir Solok	PECEL LELE PARSEL HATI PUAS PRIMADONA	
400	RSUD M. Natsir Solok	IDE	
401	RSUD M. Natsir Solok	SMART-IGD INFO Si PRia CeTar	
402	RSUD M. Natsir Solok	GeRaK Pemanis	
403	RSUD M. Natsir Solok	LEMOCA MANTAN RAKUS	
404	RSUD M. Natsir Solok	SEHAT DEK CTAR KUAT	
405	RSUD M. Natsir Solok	PELITA	
406	RSUD M. Natsir Solok	PINTAR-ICU Penerapan PROLIST	
407	RSUD M. Natsir Solok	GO-ASKep e-STERM	
408	RSUD M. Natsir Solok	"STERIL DIGI-OK	
409	RSUD M. Natsir Solok	Care Bersama Q	
410	RSUD M. Natsir Solok	pendidikan	
411	RSUD M. Natsir Solok	SIPANDA-INAP	
412	RSUD M. Natsir Solok	ARAH ANGIN DIARI DIANA	
413	RSUD M. Natsir Solok	POKEMON BARASIAH	
414	RSUD M. Natsir Solok	PENUH PROMISE	
415	RSUD M. Natsir Solok	KAMU JATUH	
416	RSUD M. Natsir Solok	SATE PADANG	
417	RSUD M. Natsir Solok	SIGAP WSD SIBATUK	
418	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	SiKePo (Sistem Kepegawaian Online)	
419	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	J'Ko Shampoo (Limbah Organik Menjadi Kompos)	
420	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	SaBoTaSe (Sampah Botol untuk Etalase Sedekah)	
421	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	APO CHAT (Antrian pengambilan obat by Chat)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
422	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	Apprist (Aplikasi Laporan dan Informasi Shift)	
423	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	BaBe DiNa (Barang Bekas Jadi Berguna)	
424	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	JAMILA RESTI (Jaringan Informasi Pemantauan Ibu Hamil Resiko Tinggi)	
425	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	JeKPOT (Jemput Keluhan Pasien on Telephone)	
426	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	KESAN SILENT (Kepuasan Pasien Berbasis Online)	
427	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	KOMPAK (KOMUNITAS PEDULI KANKER)	
428	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	LADU SALA (Layanan Pengaduan Kebersihan Lingkungan)	
429	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	PATROLISE HD (Pasien Kontrol Cairan Sebelum Hemodilisa)	
430	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	RESAPAN TERATAY (Kurangi Kecemasan Pasien dengan terapi Murottal dan Tayamum)	
431	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	SI Gemoy Beraksi (Sistem Pengendalian Indeks Massa Tubuh/Body Mass Index Berbasis Aplikasi dan Edukasi)	
432	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	Si King KuWat (Sistem Tracking Kebutuhan Keperawatan)	
433	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	SIAP GOESH (Sistem Informasi Analisis dan Pelaporan Mutu Menggunakan GOOGLE SHEET)	
434	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	SIKKODIR (Sistem Informasi Kendali Kerja Dan Resiko Oleh Direktur)	
435	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	Belalai Dori (Berilah Nilai Dokter IGD)	
436	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	SIMI (Sistem Informasi Manajemen Inventory)	
437	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	Sipeda Gawai Elektronik (Sistim Informasi Pengelola Data Kepegawaian berbasis Elektronik)	
438	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	SIORBA (Sistem Informasi Dan Pengorganisasian Rencana Bisnis Anggaran)	
439	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	SiCabam (Sistim Catatan Barang Modal)	
440	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	BERAKSI (Berdayakan Ayah untuk Kuatkan ASI) sebagai upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
441	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	Cek Gu (Cek Gajiku)	
442	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	Jerih Toserba (Jerigen HD untuk serbaguna)	
443	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	Kang linen untuk mengurangi limpas (kantong linen untuk mengurangi limbah plastik)	
444	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	KUSIMAK DIGITAL (Kurangi sisa makanan anak dengan layanan digital)	
445	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	LILAKU RSAM 4GH (Limbah Layakku RSAM Menuju Green Hospital)	
446	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	PENSILKU (Pemanfaatan dan Efisiensi Limbahku)	
447	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	RSAM TV (Rumah Sakit Achmad Mochtar Televisi)	
448	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	SEHATI (Sistem Edukasi dan Harmonisasi Terpadu untuk Individu)	
449	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	SI PAMAN (TRANSAKSI PEMBAYARAN YANG JAMAN DAN CEPAT)	
450	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	SIPAPA (Sistim Integrasi Pendapatan RSAM 450 Bukittinggi dengan aplikasi e-Pendapatan berbasis Adroid)	
451	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	SIREBUTAN (Sistem Perencanaan Kebutuhan Anggaran)	
452	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	Sistem Informasi Kinerja Rumah Sakit (SIKERS)	
453	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	SIVAPORITE (SISTEM EVALUASI DAN PELAPORAN TERINTEGRASI)	
454	Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	KAPULAGA	
455	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	Inovasi APM SEJIWA (Anjungan Pendaftaran Mandiri Sistem Elektronik Rumah Sakit Jiwa Saanin Padang)	
456	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	LIRIK SI PAMAN (Lingkungan Terapeutik dan Safewards Intervention Agar Pasien Nyaman dan Aman)	
457	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	PAGI KREASI (Perawat Aktif Giatkan Rekreasi, Relaksasi, Edukasi, dan Sosialisasi)	
458	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	Pro PION (Program Pelayanan Informasi Obat Online)	
459	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SIPATU (Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Tata Usaha)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
460	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SIPOLIN V.2 (SISTEM INFORMASI PENGUKURAN KINERJA ONLINE VERSI 2)	
461	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	TELEPORTASI (Content Live Report Sumber Informasi)	
462	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	UDA GAGAH (Upayakan Deteksi dan Konsultasi untuk Cegah Pasung dan Kekambuhan)	
463	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	DOPAMIN (Dokumentasi Pemantapan Mutu Internal Laboratorium RS Jiwa Prof HB Saanin)	
464	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	TALK GME (Deteksi Dini Dan Penatalaksanaan Gangguan Mental Emosional Pada Remaja Di Komunitas Sekolah)	
465	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SEAPI (Sistem Elektronik Apel Pagi)	
466	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	DIGISAKTI (Digitalisasi Sertifikat Dan Arsip Pegawai Terkini)	
467	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	KOMPAK (Kendali Otomatis Masa Pangkat ASN)	
468	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	PERISAI UNTUK BUDIR (Perawat Jiwa Lakukan Deteksi Dan Konsultasi Untuk Cegah Bunuh Diri)	
469	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	PAKU SAKTI (Pemberdayaan Keluarga Melalui Buku Saku Keperawatan Jiwa)	
470	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SATE BAKAR (Spritual Story Telling Bantu Kendalikan Amarah Anak Dan Remaja Di Rawat Inap)	
471	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	PANJI MERAH (Pasien Jiwa Mengaji Untuk Mengontrol Marah)	
472	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SIKAP RANAP (Sistem Informasi Dan Kendali Asuhan Pasien Rawat Inap)	
473	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	KENCANG KOPAJA (Kegiatan Minat Baca Merangsang Kognitif Pasien Jiwa)	
474	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SENTAK JIWA (Senam Otak Untuk Pasien Jiwa)	
475	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	BELA OM ERED (Pemberian Label Obat-Obat Mendekati Expire Date)	
476	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SIMANIS (Sistim Pencatatan Permintaan Makanan RS)	
477	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	STAR-LAB (Sistem Audit Reagensia Laboratorium)	

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
478	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	e-KSLAB (Kartu Saham Laboratorium Elektronik)	
479	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	PAMAN BERKUMIS (Pot Tanaman Berkualitas dan Ekonomis)	
480	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	dan Ekonomis) ORDIR KODWAR (Order Rongent Kordinasi JANGAN)	
481	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	e-RIHANNA (Elektronik Diari Sehat Tanpa Napza)	
482	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	LASERIN (Layanan Kolaborasi Edukasi Terintegrasi)	
483	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	N-CONNECT (Koneksi NAPZA)	
484	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	REVRESHING (Pencegahan dan Berbagi Kekambuhan)	
485	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	PRIMA (Pelihara Raga Dan Imun Melalui Aktivitas Senam Peregangan Disela Bekerja)	
486	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	BISIK GEMAS (Bincang Asyik Bersama Humas)	
487	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	TARIK JEMPOL (Daftar Informasi Publik Jemput Bola)	
488	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	PEDULI (Pelayanan Informasi Untuk Disabilitas)	
489	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	P3SAN SOP Iga (Pengendalian Proses Pelaporan Persediaan Barang Gudang Dengan Standar Operasional Yang Terintegrasi)	
490	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SIPAGU (Sistem Informasi Persediaan Barang Gudang)	
491	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SITANGGUH ON V.2 (Sistem Informasi Pertanggung Jawaban SPJ Online)	
492	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SMART Tarif (Sistem Manajemen Tarif Terintegrasi)	
493	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SIKAS Cer das (Sistem Informasi Kendali Kerja Sama dan Tagihan)	
494	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SIKETUPAT (Sistem Informasi Pengurusan KP4)	
495	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SICUPA (Sistem Cuti Pegawai)	
496	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SIEDoRa) Sistim Elektronik Dokumen Rapat	
497	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SI AdIK (Sistim Informasi Akademik dan Klinik)	

<b>No</b>	<b>Pelaksana Inovasi Daerah</b>	<b>Inovasi Daerah</b>	<b>Keterangan</b>
498	RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	SIPMASTER v. 2 (Sistem pengelolaan mahasiswa terintegrasi)	